

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan lingkungan hidup, salah satunya adalah isu lingkungan. Kemunculan isu lingkungan ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama Negara. Kerusakan hutan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lainnya ialah penebangan hutan hujan, pembangunan di lahan gambut padat karbon, dan pembangunan jalan di wilayah sensitif. Menurut WWF Indonesia, Asia Pulp and Paper atau APP bertanggung jawab atas kesalahan itu. Bersama dengan pemasoknya, APP telah membuka lebih dari satu juta hektar hutan alami hanya di Propinsi Riau dan Jambi saja, membuatnya bertanggungjawab atas lebih banyak penggundulan hutan dibanding perusahaan manapun yang bekerja di Sumatera¹. Dari sekian kontroversi dan masalah yang telah ditimbulkan oleh perusahaan ini, Asia pulp and Paper mengeluarkan komitmen *Zero Deforestation* atau tidak ada deforestasi hutan pada tahun 2013 yang dimaksudkan untuk pengembalian fungsi hutan. Dalam perjalanannya tentu ada dorongan dibalik terbentuknya komitmen ini, dorongan yang datang dari pemerintah, organisasi non pemerintah (NGO), maupun dorongan dari pasar.

¹Rhett.A.Buttler. (2011). "Apakah Menebang Hutan Hujan Untuk Kertas dan Bubur Kayu Bantu Kurangi Kemiskinan di Indonesia?". http://indonesia.mongabay.com/news/2011/id0121-0113-pulp_and_paper_indonesia.html (diakses 18 November 2015 08.13)

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu lingkungan menjadi isu yang sangat berkembang di dunia internasional terutama di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terbesar di dunia dan di daulat sebagai salah satu paru-paru dunia oleh PBB. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development Works (Alliance)*, *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.²

Hutan menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan populasi yang semakin lama semakin meningkat, hal itu juga diiringi oleh meningkatnya pasokan CO₂ di udara disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia,

²Wihardandi, Aji. (2012). "Degradasi Lingkungan, Peringkat Resiko Bencana Indonesia Melonjak". <http://www.mongabay.co.id/tag/laporan/> (diakses 2 November 2015)

seperti berkembang pesatnya industri transportasi dalam perkembangan ekonomi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar gas CO₂, disamping industri-industri yang lain. Peran hutan saat ini menjadi sangat penting dalam mengontrol kualitas udara yang ada di dunia. Termasuk salah satunya hutan di Indonesia, yang menjadi salah satu paru-paru bagi dunia. Namun, semakin banyaknya industri yang berkembang pesat di Indonesia. Membuat keseimbangan hutan Indonesia menjadi terganggu dan terancam.

Kontradiksi dengan hal tersebut “pemanfaatan” hutan untuk berbagai industri pun semakin gencar di lakukan, salah satunya adalah industri kertas. Kertas merupakan bagian terpenting dari sejarah perkembangan teknologi di dunia. Kertas dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah kemajuan telekomunikasi di dunia. Dari kertas ilmu-ilmu pengetahuan di seluruh dunia dapat direkam dan di sebar ke seluruh penjuru dunia. Namun disisi lain bahan bakukertas yakni kayu kini menjadi komoditas yang sangat rentan keberadaannya. Produksi kertas sangat bertentangan dengan isu perlindungan hutan dan sangat erat hubungannya dengan Global Warming. Hal yang sangat ironis ketika disisi lain kita juga membutuhkan kertas sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan hutan dilakukan oleh industri bubur kertas atau perusahaan-perusahaan kertas yang telah berlangsung sejak lama. Kapasitas pengolahan kertas itu bergantung pada besar atau tidaknya suatu perusahaan kertas. Apabila perusahaan kertas itu merupakan perusahaan besar, tentu saja memiliki lingkup pemasaran yang luas pula, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak hutan yang harus dikelola untuk memproduksi jutaan bahkan miliaran ton

kertas dan bubur kertas untuk memenuhi kebutuhan kertas yang ada dalam lingkup pemasarannya di dunia.

Salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia ialah perusahaan Asia Pulp & Paper atau disebut APP. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan produsen kertas terbesar di dunia. Perusahaan ini bermula pada tahun 1972 sebagai perusahaan penghasil soda kaustik. Sekarang, perusahaan ini telah beroperasi di Indonesia dan China, dan kertas hasil olahan pabriknya telah digunakan lebih dari 120 negara di dunia. Pada 1984, kelompok Sinar Mas Group yakni Asia Pulp & Paper bermarkas di Shanghai, China. Mulai mengoperasikan pabrik pengolahan bubur kertasnya pertama di Provinsi Riau, Sumater Utara. Pabrik milik APP itu, ialah Indah Kiat Pulp & Paper, adalah pabrik pengolahan bubur kertas raksasa di Indonesia dengan kapasitas produksi 105.000 ton per tahun. Pada 1994, APP membuka pabrik pengolahan bubur keduanya di provinsi Jambi.³ Dengan kapasitas yang sebesar itu, tentu saja perusahaan ini membutuhkan banyak suplai kayu pohon untuk diolah menjadi bubur dan kertas.

Bahan baku kertas berasal dari serat kayu pohon. Sayangnya, terkadang produksi kertas dilakukan dengan mengambil bahan baku serat kayu dari hutan alam, bukan dari hutan tanaman atau budidaya, sehingga mengancam kelestarian hutan alam dan keanekaragaman hayati didalamnya. Menurut kajian CIFOR, secara nasional industri bubur kertas Indonesia belum mampu menjamin seluruh pasokan kayu pulp dari hutan tanaman industri (HTI) yang dibangun secara berkelanjutan. Sehingga sebagian besar pabrik bubur kertas masih tergantung

³ Eyes on the Forest, *Kebenaran di balik greenwash APP*, Desember 2011. (diakses, 17 april 2015)

pada pasokan bahan baku dari hutan alam. Praktek yang berkelanjutan oleh industri pulp dan kertas mengancam hutan alam dan kelangsungan satwa dilindungi didalamnya, seperti harimau dan gajah Sumatera, dan juga menyebabkan hancurnya kawasan tempat tinggal masyarakat suku asli seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.⁴

Perusahaan kertas Asia Pulp & Paper mendapat berbagai kritikan dari LSM atas dasar pemeliharaan lingkungan. Menurut Friends of the Earth⁵ laporan dari tahun 2005, APP telah membersihkan lebih dari 280.000 hektare hutan dalam dekade terakhir, dan berencana untuk memotong 300.000 lain selama lima tahun ke depan. Kemudian WWF (World Wild Fund For Nature) juga mengatakan pada tahun 2003, ia sempat mengadakan perjanjian kemitraan dengan APP, namun hanya berselang 6 bulan, WWF mengakhiri hubungan kerja sama tersebut karena menolak menyetujui rencana pengelolaan lingkungan, serta mempertanyakan figur APP.⁶ Pada bulan November 2007, Forest Stewardship Council (FSC) secara resmi memisahkan diri dengan APP, menyatakan tidak lagi berlakunya hak APP menggunakan logonya. Pada penghentian semua hubungan dengan FSC pada 2007.⁷

⁴Arifiandi, Nur Maliki. (2011). "Pulp and Paper". http://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/pulp_and_paper/ (diakses 2 November 2015)

⁵Friend of The Earth. (2012). "Indonesia Trees Without Indonesia Trees". www.foei.org (diakses, 18 april 2015)

⁶Donnan, Shawn (21 February 2006). "Home/UK/UK-The usefulness of scholarships and tigers". *Financial Times*. (diakses 19 april 2015)

⁷"FSC rules in upheaval after green groups level accusations at APP | printweek.com | Latest Print Industry News, Jobs, Features, Product Reviews, Used Printing and Packaging Machinery". printweek.com. 1 November 2007. (diakses pada 19 april 2015).

Dari laporan yang dikeluarkan oleh berbagai LSM, menunjukkan bahwa APP memiliki peranan besar atas kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, APP juga ikut andil dalam hilangnya hutan alam di Indonesia. Sampai dengan awal tahun 2013, APP telah mengumumkan kebijakan terbarunya yaitu kebijakan konservasi hutan APP atau tidak ada deforestasi. Kebijakan tersebut mencakup penangguhan segera terhadap seluruh kegiatan pembukaan hutan alam oleh pemasok, juga komitmen untuk tidak lagi mengembangkan usaha perkebunan di wilayah berhutan. Kebijakan Konservasi Hutan juga mengikat pemasok APP untuk memastikan “tidak ada lagi kanal lanjutan atau pembangunan infrastruktur di wilayah konsesi milik pemasok yang belum dikembangkan di wilayah lahan gambut tidak berhutan hingga penilaian Hutan Stok Karbon Tinggi, termasuk masukan dari ahli gambut, selesai dilakukan. Kemudian Greenpeace menghentikan kampanye aktif terhadap APP untuk memberikan perusahaan tersebut ruang dan waktu guna mengimplementasikan kebijakan “*Zero Deforestation* atau Tidak ada Deforestasi”.⁸

Sehubungan APP ini merupakan perusahaan besar yang kontroversial, kondisi ini menciptakan berbagai reaksi yang cenderung negatif baik dari LSM lokal dan internasional seperti Walhi dan Greenpeace, Pemerintah daerah dan pusat, Negara investasi, serta pasar perusahaan APP. Reaksi yang timbul itu dapat menjadi beberapa faktor atau alasan dibalik terbentuknya kebijakan konservasi hutan APP atau *Zero Deforestation*. LSM disini memiliki peran sebagai aktor yang membantu pemerintah mengontrol APP dalam produksinya yang sesuai

⁸ Greenpeace, *Kebijakan Konservasi Kehutanan APP, Oktober 2013, hlm.3.* (diakses, 20 april 2015)

dengan regulasi. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Greenpeace, ialah dengan melakukan kampanye terhadap perusahaan yang bekerjasama dengan APP untuk menghentikan hubungannya dengan kata lain harus melakukan boikot terhadap APP. Dari laporan yang dikeluarkan oleh berbagai LSM, menunjukkan bahwa APP memiliki peranan besar atas kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, APP juga ikut andil dalam hilangnya hutan alam di Indonesia.

APP menyatakan bahwa perusahaannya akan menggunakan 100% kayu tanaman industry pada tahun 1990 dan ditarget akan tercapai pada tahun 2004. Kebijakan tersebut mencakup penangguhan segera terhadap seluruh kegiatan pembukaan hutan alam oleh pemasok, juga komitmen untuk tidak lagi mengembangkan usaha perkebunan di wilayah berhutan. Kebijakan Konservasi Hutan juga mengikat pemasok APP untuk memastikan “tidak ada lagi kanal lanjutan atau pembangunan infrastruktur di wilayah konsesi milik pemasok yang belum dikembangkan di wilayah lahan gambut tidak berhutan hingga penilaian Hutan Stok Karbon Tinggi, termasuk masukan dari ahli gambut. Namun kebijakan yang direncanakan ini belum dapat diwujudkan oleh APP sehingga direvisi ke tahun 2007, untuk kemudian mundur kembali pada tahun 2009. Di tahun 2011, perusahaan melakukan target revisi ke tahun 2015. Namun pada kenyataannya APP mengeluarkan kebijakan konservasi hutan ini pada tahun 2013 yang sebelumnya direncanakan tahun 2015. Kebijakan yang dikeluarkan oleh APP ini menjadi menarik untuk diteliti karena bertentangan dengan keadaan APP yang membutuhkan banyak suplai kayu pohon. Kemudian timbul pertanyaan untuk mencari tahu apa saja faktor dibalik terbentuknya komitmen ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah lebih lanjut maka butuh satu rumusan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan permasalahan tersebut adalah:

“Mengapa *Asia Pulp and Paper Co.Ltd* mengeluarkan kebijakan *Zero Deforestation* (Konservasi Hutan) lebih dari target tahun 2015?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dibalik terbentuknya *Zero Deforestation* (kebijakan konservasi hutan) *Asia Pulp and Paper*.

Tujuan lain yang tidak luput adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Landasan Teori

Landasan teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena landasan teori inilah yang nantinya digunakan penulis sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Teori selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teori adalah satu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan.⁹ Pertanyaan yang disebut teori itu merupakan sekumpulan generalisasi. Teori bukan hanya sekedar kumpulan generalisasi melainkan lebih

⁹ Mas'oed, Mohtar. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta, LP3ES, 1990), Hal 219

kepada pernyataan yang menjelaskan generalisasi itu sebagai sarana ekspansi. Dalam prosesnya teori akan membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti

Teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi-proposisi atau pernyataan misalnya, perilaku rasional berdasar satu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti dibuat untuk menggambarkan perilaku politik aktor-aktor rasional.¹⁰

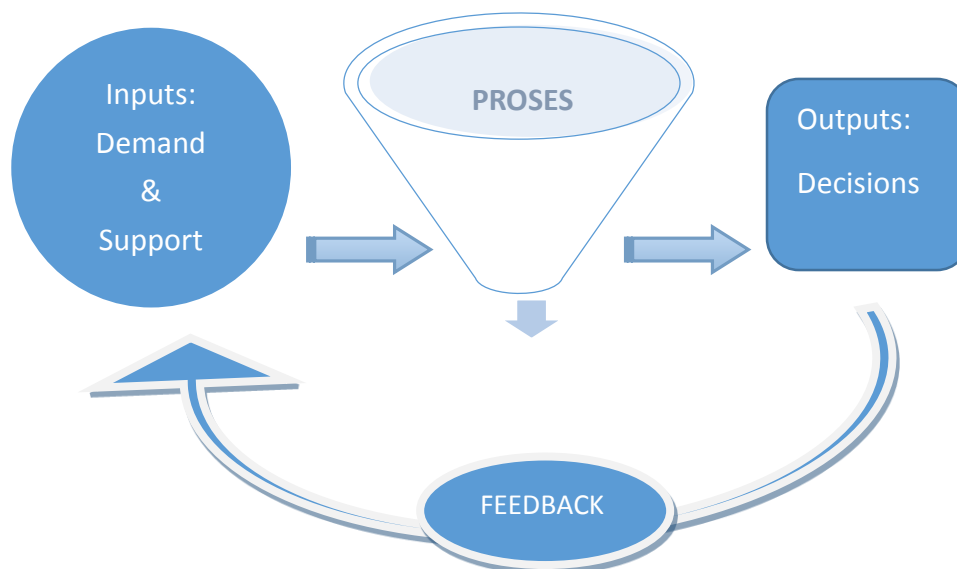
1. Teori Sistem (*System Theory*)

System berasal dari bahasa Yunani (*sustema*) yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “immaterial” atau suatu proses “immaterial”, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat “immaterial” penguraian atau penentuan “model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis.

¹⁰ Ibid, Hal 22

David Easton¹¹ dalam bukunya (terjemahan) Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik megartikan teori sistem sebagai suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem sebagai suatu unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, atau organisasi pemerintah). Easton juga meringkas ciri-ciri teori sistem sebagai berikut : a. sistem mempunyai batas yang di dalamnya ada hubungan fungsional yang dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi, b. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lain melakukan pertukaran (contohnya, antara desa dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat), c. sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (*input*) kedalam beberapa jenis keluaran (*output*).

Bagan 1.1 Kerangka Fikir Teori Sistem



¹¹Easton, David, dan Sahat Simamora (alih bahasa), *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara, 1984

Dalam diagram ini terdapat Inputs, Process, Output, kemudian ada Feedback dari output yang dihasilkan. Pada kasus APP ini, Inputs dibagi menjadi Demand dan Support. Demand atau tuntutan ini bisa berasal dari Organisasi Internasional yang menuntut perusahaan agar menciptakan *Zero Deforestation*. Kemudian ada perusahaan yang bekerja sama dengan APP dengan menggunakan produk, atau hasil olahannya. Mereka menghentikan kerjasama agar menghentikan degradasi lahan gambut dan deforestasi hutan. Support atau dukungan dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan serta Undang-undang bagi kelestarian hutan dan lingkungan. Setelah adanya inputs, kemudian dilakukan sebuah proses. Dimana yang mempertimbangkan untuk mengeluarkan suatu kebijakan dari perusahaannya. Proses ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang memiliki wewenang di bidangnya. Setelah hasil dari proses ini ditentukan, barulah akan menjadi suatu output atau kebijakan.

Diagram ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan politik penggunaan sistem: (1) Memungkinkan kita melakukan pemisahan antara kehidupan politik dari kehidupan yang lain dari masyarakat, yang oleh Easton disebut sebagai "lingkungan"; (2) Pemisahan ini ditandai oleh suatu garis batas; (3) Kasus sistem politik didefinisikan sebagai "tindakan yang berhubungan dengan keputusan yang mengikat masyarakat"; (4) Unit-unit sistem politik adalah berupa tindakan politik (political actions); (5) Inputs dalam bentuk tuntutan dan dukungan memberi makna pada sistem politik. Inputs berupa "tuntutan" bisa timbul baik di dalam lingkungan itu ataupun di dalam sistem itu sendiri. Apakah dirancang secara eksternal ataupun menjadi isu-isu, anggota sistem politik siap untuk

mengganggunya sebagai hal yang penting untuk dilaksanakan melalui saluran-saluran yang diakui didalam sistem itu. Sedangkan inputs dalam bentuk "dukungan" merupakan tindakan atau orientasi yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik; (6) Outputs berasal dari sistem politik dalam bentuk keputusan dan tindakan kebijaksanaan. Outputs akan bisa (i) berubah menjadi umpan balik dalam lingkungan agar memuaskan tuntutan dari beberapa anggota sistem itu, dan kemudian akan menggerakkan dukungan terhadap sistem itu, dan juga (ii) bisa menimbulkan konsekuensi negatif, yang memunculkan tuntutan baru pada sistem politik itu.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa sistem merupakan satu kesatuan komponen (individu, maupun kelompok) yang saling berinteraksi memiliki fungsi dan peranan masing masing sehingga membentuk satu rangkaian yang dapat mempengaruhi satu sama lain (apabila salah satu bagian terganggu maka bagian lain dalam rangkaian akan mendapatkan gangguan). Terkait dengan teori sistem, dalam hubungannya secara fungsional, APP, Pasar, dan organisasi internasional dalam tulisan ini dapat dikatakan merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Untuk itulah teori sistem digunakan untuk menjawab rumusan masalah “Apa saja faktor dibalik terbentuknya kebijakan konservasi hutan *Asia Pulp and Paper Co.Ltd?*” dilihat dari keterkaitan APP dengan Pasar dan organisasi internasional sehingga dapat mempengaruhi *output* kebijakan APP.

Dalam kasus *Asia Pulp and Paper*, proses didalam teori ini di analogikan menjadi sebuah perusahaan. Sehingga dalam inputsnya sendiri lebih banyak terdapat *demands* atau tuntutan terhadap APP dibandingkan dengan *support* itu

sendiri. Tuntutan yang dimaksudkan, bisa berasal dari organisasi internasional, pemerintah, maupun negara lain yang bekerja sama. Dari tuntutan-tuntutan yang ditujukan terhadap APP ini kemudian perusahaan ini melakukan suatu “proses” dimana didalamnya terdapat beberapa hal yang dilakukan sebelum terbentuknya sebuah keputusan. Pertama pengidentifikasian masalah oleh *stakeholder* APP masalah yang timbul karena kegiatan eksplorasi APP yang berlebihan berdampak pada banyaknya protes dari pemerintah dan NGO. Tentunya kerugian bagi APP yang mengakitatnya hilangnya klien mereka satu persatu. Melihat kondisi tersebut APP kemudian menilai bahwa harus ada perbaikan. Setelah mengetahui masalah yang dihadapi adalah mengukur skala prioritas, mana masalah yang terlebih dulu harus diselesaikan. Setelah menentukan skala prioritas, barulah para *stakeholder* APP merumuskan sebuah formulasi beberapa rencana program atau kebijakan yang harus dilakukan. APP membentuk sebuah divisi yang khusus menangani *Sustainability* Program. Bagian tersebut di kepalai oleh Aida Greenbury melakukan Pertemuan pertama pada 15 Mei 2012 dengan perwakilan dari HCVRN (*High Conservation Values Resource Network*) yaitu Marcus Colchester sebagai Wakil Ketua HCVRN serta sebagai Direktur FPP (*Forest People Programme*). Elim S sebagai deputy CEO Sinar Mas bagian Kehutanan, Dewi Bramono sebagai deputy direktur divisi *sustainability* APP dan Ketua Proyek *Sustainability Road Maps* serta team penilai *High Conservation Values*. (HCV) bergabung ke dalam rapat tersebut. Secara keseluruhan pertemuan menghasilkan lima point penting yang pertama Pre-Assesment (masih dalam proses), yang kedua Finalising TORs untuk penilaian secara keseluruhan yang

ketiga *carry out assessment with parallel stakeholders engagement process*, keempat *Final Report* untuk seluruh peserta meeting dengan target *deadline* sampai dengan kuartal ketiga tahun 2013. Dan terakhir Pembentukan rencana Management kebijakan. *Meeting* pertama dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012 meliputi perwakilan APP, dan FPP sebagai team penilai kebijakan.¹² Pada fase ini, seluruh *stakeholder* APP melakukan sebuah pertemuan yang akan membahas dan memutuskan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilakukan atau tidak setelah melakukan penilaian. Barulah setelah semua telah disepakati kebijakan itu di publikasikan kepada publik. Proses inilah yang kemudian menghasilkan sebuah *Outputs* berupa *Decisions* yang nantinya akan dievaluasi secara berkala. Karena dalam teori system semua sub sistemnya saling berpengaruh, *Outputs* yang dihasilkan oleh APP disini dipengaruhi oleh *Inputs*. *Inputs* inilah yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah "Mengapa APP mengeluarkan kebijakan *Zero Deforestation*".

E. Hipotesa

Asia Pulp and Paper mempercepat komitmen kebijakan konservasi hutan (*Zero Deforestation*) dua tahun lebih cepat pada tahun 2013, karena:

1. Dukungan dari pemerintah (kebijakan)
2. Tuntutan oleh LSM (Greenpeace)
3. Dukungan dari pasar Asia Pulp and Paper (LEGO, Mattel, KFC, dll)

¹² Note On Meeting APP and FPP 19 September 2012, diakses 26 April 2016

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, jangkauan penulisan yang dapat dilakukan penulis yakni dimulai sejak berdirinya *Asia Pulp and Paper Co.Ltd* sampai terbentuknya komitmen kebijakan konservasi hutan APP atau *Zero Deforestation* pada tahun 2013. Dikarenakan banyak masalah lain yang tidak dapat dibahas guna tercapainya sasaran penelitian ini menjadi satu penelitian yang fokus dan mendalam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian itulah, peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data. Menurut Miel & Huberman (1992) dalam metodologi kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses sebelum siap digunakan.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, Men-test hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. (Suryabrata, 2006)

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya diinterpretasikan dan dianalisa. Menurut Lofland & Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah berupa data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain (Bungin, 2003: 112). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari informan atau para sumber yang diteliti. Sedangkan data sekunder biasanya berupa dokumen, data-data statistik, sumber data tertulis, laporan yang akan menunjang dan memperkuat data utama untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini data penulis hanya bersumber pada data sekunder yakni dokumen, hasil penelitian terdahulu, ataupun berita yang dimuat baik di media cetak, maupun elektronik dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti.